

**KEBIJAKAN INDONESIA MENINGKATKAN KEAMANAN LAUT
DALAM KASUS PENYANDERAAN WARGA NEGARA (WNI)
INDONESIA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF PADA TAHUN 2016**

Rian Rosyadi

Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si.

Fakultas Ilmu Sosiasal dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

This thesis is aimed to shown to know the policy of Indonesia in responding to cases of abduction of Indonesian citizens by Abu Sayyaf Group in 2016. This thesis explains about the policies regarding Indonesia's policies to be able to improve the security of the sea in an effort to prevent cases abduction of Indonesian citizens by Abu Sayyaf Group. In its policy, Indonesia implements smart power to improve the security of the sea from the threat of Abu Sayyaf Group. This is done because the sea is the most used medium in terms of cross-economy so that if the sea is threatened from maritime crime it will affect to the Indonesian economy. In this thesis uses the concept of smart power that initiated by Joseph Nye and the concept of maritime security. Source of datas for developing and explaining this thesis are, books, journals, news, and various articles in websites that have been analyzed in the discussion session. The results of this thesis shows that by implementing smart power will be more effective for Indonesia in an effort to improve the security of the sea so that cases of abduction of Indonesian citizens by Abu Sayyaf Group can be prevented. In addition, Indonesia's maritime security will bring changes to the economic development and also security of the sea.

Keywords: *smart power, security of the sea, Abu Sayyaf*

**KEBIJAKAN INDONESIA MENINGKATKAN KEAMANAN LAUT DALAM KASUS
PENYANDERAAN WARGA NEGARA INDONESIA (WNI) OLEH KELOMPOK ABU
SAYYAF PADA TAHUN 2016**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di Asia dan kedua di dunia yang memiliki sekitar 17.506 pulau-pulau besar dan kecil, serta luas wilayah lebih dari 7,7 juta km², dimana 2/3 bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari 5,8

juta km², dengan garis pantai sepanjang lebih dari 81.000 km², dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil (TNI AL:10).

Dengan begitu luasnya perairan yang dimiliki Indonesia membuat negara ini menjadi sebagai negara maritim di dunia yang sering kali mengalami ancaman dan gangguan dari pihak luar terhadap wilayah teritorial negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya keanekaragaman sumber daya alam laut yang potensial, baik hayati dan non-hayati yang dapat memberikan nilai tinggi pada sumber daya alam serta adanya keistimewaan posisi letak strategis Indonesia. Laut merupakan media yang paling banyak digunakan dalam hal lintas ekonomi maupun kapal-kapal militer, serta rentan akan adanya ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta baik tradisional maupun non-tradisional.

Bentuk pelanggaran yang terjadi di laut diantaranya seperti pelanggaran wilayah (*illegal entry*), *IUU Fishing (Illegal Unregulated Unreported Fishing)*, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), *smuggling* dan lainnya. Karena apabila ancaman diatas tidak di atasi secara serius maka dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan lingkungan, keamanan ekonomi, keamanan energi, keamanan pangan, keamanan manusia secara luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini tentunya akan sangat merugikan negara.

Adanya aktor-aktor yang terlibat dalam permasalahan ini sangat komplit dan saling berkaitan satu sama lain. Di era globalisasi ini pelaku tidak hanya berasal dari sebuah negara melainkan aktor non-negara juga menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Seperti halnya kelompok Abu Sayyaf yang sering melakukan aksi penculikannya. Para nelayan Indonesia tidak luput dari ancaman tersebut. Pada tahun 2016 setidaknya telah terjadi tujuh kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf secara berturut-turut. Hal tersebut mendapatkan perhatian dari dunia internasional karena Indonesia tidak dapat melindungi warga negaranya dari ancaman pihak luar.

Kelompok Abu Sayyaf adalah kelompok separatis yang bemarkas di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilian, dan Mindanao. Kelompok ini dibentuk pada tahun 1993 oleh Abdurajak Abubakar Janjalani yang memiliki misi untuk mengubah Filipina Selatan menjadi negara Islam. Kelompok ini juga memiliki keterkaitan dengan kelompok separatis lainnya seperti Al-Qaeda, Jemaah Islamiyah (JI), dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sumber dana kelompok Abu Sayyaf ini adalah dari pemberian beberapa kelompok separatis lainnya tersebut dan juga dari tebusan sandera. Oleh karena itu, maka upaya pertahanan sangat

perlu ditingkatkan dalam menjaga keamanan wilayah Indonesia terutama wilayah laut yang luas dari pihak luar serta melindungi sumber daya nasional dan keamanan warga Indonesia.

Untuk upaya dalam menjaga keamanan wilayah laut Negara Kesatuan Republik Indonesia maka TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang memiliki tugas dan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Namun, alat utama sistem pertahanan (alutsista) Angkatan Laut masih belum cukup memadai. Oleh karena itu, Mantan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono merencanakan untuk meningkatkan kekuatan Angkatan Laut dengan merencanakan untuk belanja armada laut secara besar-besaran. Program belanja armada ini dikenal dengan sebutan *Minimum Essential Force* (MEF) yaitu program pemenuhan armada Angkatan Laut untuk standar minimal yang dipersyaratkan. Hingga pada akhir masa jabatan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program MEF masih pada tahap pertama. Kemudian diharapkan Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan program MEF tahap kedua (Ziyadi, 2016).

Presiden Joko Widodo memang melanjutkan program MEF tahap kedua. Namun, terdapat perbedaan antara era Joko Widodo dan era Susilo Bambang Yudhoyono dalam meningkatkan keamanan laut Indonesia. Presiden Joko Widodo tidak semata-mata hanya berfokus pada meningkatkan kekuatan Angkatan Laut saja, namun ia juga mencoba untuk lebih menerapkan diplomasi maritim. Diplomasi maritim sendiri adalah negosiasi atau perundingan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih mengenai batas laut, kerjasama maritim serta pertahanan maritim (Sangkoeno, 2015). Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari, mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia untuk kedepannya akan menunjang diplomasi ekonomi dan maritim. Dia juga menegaskan diplomasi nasional akan menunjang kepentingan nasional dan masyarakat (Sunardi, 2015).

Hal ini dilakukan karena Angkatan Laut sebagai aktor utama dalam mengatasi kasus-kasus pelanggaran di laut sudah tidak terbukti lagi untuk dapat menyelesaikannya, hal ini dapat dilihat dari masih maraknya terjadi pelanggaran maritim. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lain dengan tidak hanya mengandalkan pada sektor militer saja yaitu sektor diplomasi. Perpaduan antara militer dan diplomasi tersebut sering disebut dengan *smart power*.

Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan keamanan lautnya. Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan Angkatan Laut saja yang dimana sebagai aktor utama dalam menjaga laut Indonesia, namun juga berdiplomasi dengan

bekerjasama dengan negara-negara lain melalui wadah organisasi ASEAN untuk bersama-sama menjaga perdamaian di laut.

PEMBAHASAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim sejak dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yaitu sebuah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yuridiksi dan Batas Maritim Internasional yang diatur dalam UNCLOS serta kebijakan pemerintah sebelumnya dalam menerapkan kebijakan maritim. Presiden Soekarno mengungkapkan “*Our geopolitical destiny is maritime*” dalam pertemuan pada 13 Desember tahun 1957 tersebut. Intinya, Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mempunyai corak tersendiri yang merupakan satu kesatuan wilayah dan hukum dengan tetap menjamin lalu lintas damai pelayaran internasional (*peaceful passage*).

Deklarasi Djuanda yang menyatakan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau sebagai satu kesatuan di bawah kedaulatan Indonesia serta penetapan garis batas teritorial dengan lebar 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.4 Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1962 (Dewan Maritim Indonesia, 2008: 2), dan menjadikan luas wilayah laut Indonesia 2.027.087 km² (wilayah daratan) menjadi 5.193.250 km² dan penambahan wilayah perairan nasional sebesar 3.166.163 km².

Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga dengan demikian laut bagi bangsa Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi. Oleh karena itu laut hanya dapat dibedakan dalam rezim hukum yang mengaturnya. Laut juga bagian integral dari wilayah dunia, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dengan demikian pemanfaatan dan penggunaan laut bagi kepentingan umat manusia harus diatur dengan hukum laut (*law of the sea*), yang disepakati bukan hanya oleh masyarakat salah satu negara tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Dalam menjaga keamanan laut Indonesia, terdapat peraturan perundang undangan didalamnya. Peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya

penegakan hukum dan keamanan dilaut jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Adapun peraturan perundang undangan yang terkait dengan keamanan laut (Wulansari, 2014) antara lain sebagai berikut.

- a) UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
- b) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- c) UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982
- d) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- e) UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- f) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- g) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
- h) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- i) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- j) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- k) UU No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabean
- l) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- m) UU. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- n) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- p) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- q) UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- r) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- s) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Kegiatan-kegiatan penegakan hukum (penyidikan hingga penuntasan tindak pidana), keamanan, dan keselamatan pelayaran di laut diselenggarakan oleh berbagai instansi yang

berbeda yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berbeda pula. Terdapat 14 instansi yang berkaitan dengan kewenangan keamanan di laut yang diantaranya adalah: 1) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, 2) Polisi Perairan (Polair), 3) Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2), yang bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor atau ekspor yang berupa penyelundupan; 5) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP) bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di laut; 6) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertugas sebagai penyidikan kekayaan laut dan perikanan di laut Indonesia; 7) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan; 8) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, dan mutu lingkungan; 9) Kementerian Hukum dan HAM, bertugas sebagai pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian; 10) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bertugas untuk penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia; 11) Kementerian Pertanian, bertugas untuk pengamanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; 12) Kementerian Lingkungan Hidup bertugas di bidang lingkungan hidup; 13) Kementerian Kehutanan, bertugas melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan meliputi penyelundupan satwa dan *illegal logging*; dan 14) Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan atau pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan (Usadi, 2014).

Keamanan di laut merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Isu mengenai keamanan di laut ini juga telah menarik perhatian negara-negara Asia. Memang pada dasarnya, kawasan Asia Tenggara lebih didominasi oleh wilayah perairan dan batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Sementara itu, seperti yang diketahui bahwa kawasan laut adalah sebagai jalur utama untuk tindak kejahatan paling besar di dunia (Cipto, 2007: 266).

Definisi tentang perompakan laut yang mengacu pada UNCLOS 1982 yaitu terdapat pada pasal 101 (UNCLOS), yaitu perompakan laut atau *piracy* terdiri atas beberapa tindakan sebagai berikut:

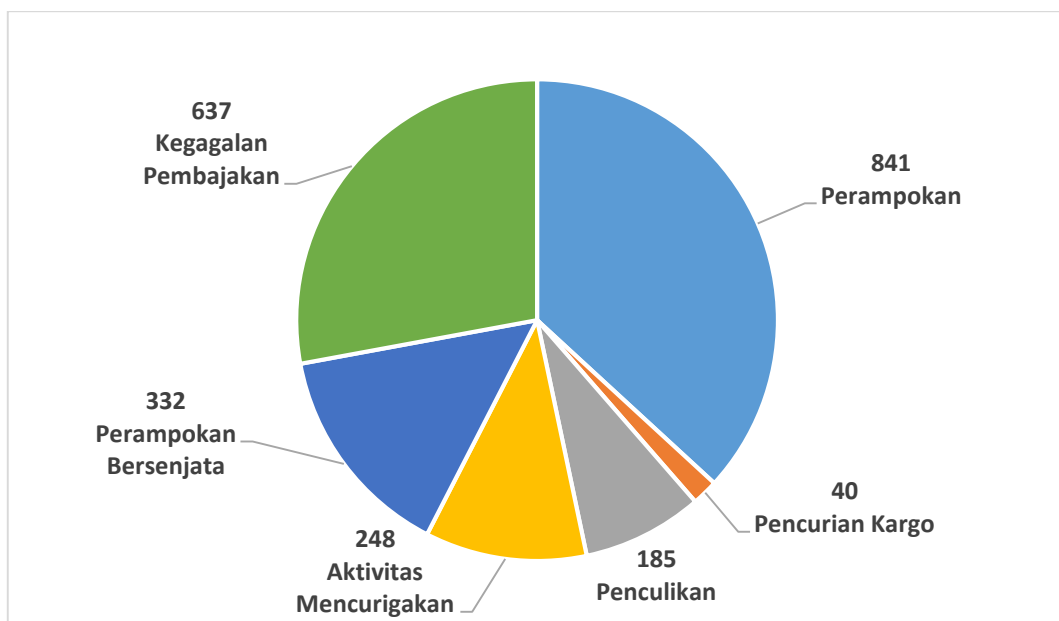
1. Setiap perbuatan dengan kekerasan secara tidak sah atau penahanan atau setiap perbuatan yang merusak yang dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang berharga milik orang secara tidak sah yang dilakukan oleh penumpang dari suatu kapal dan dilakukan:

- a) Di laut bebas terhadap kapal lainnya atau terhadap seseorang atau barang berharga yang ada diatas kapal.
 - b) Terhadap suatu kapal, seseorang atau barang berharga di luar yurisdiksi dari suatu negara tertentu.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan secara sukarela dalam suatu operasi dari kapal yang diketahui perilaku secara nyata sebagai kapal perompak.
 3. Setiap perbuatan yang mendorong atau memfasilitasi suatu perbuatan melawan hukum suatu negara sebagai tersebut dalam item 1 atau 2 di atas.

Banyak pihak menyangka perompakan laut atau bajak laut hanya beroperasi di Somalia. Namun, kenyataannya adalah 41% aktivitas serangan perompakan laut dunia antara 1995 sampai 2013 terjadi di Asia Tenggara. Somalia yang berada di Laut Hindia Barat hanya menyumbang 28% aktivitas perompakan laut dunia, sementara itu pantai Afrika Barat 18%.

Menurut data rilisn *Oceans Beyond Piracy* (OCB), selama 2016 terdapat 129 laporan insiden pembajakan laut yang menyebabkan gangguan terhadap 2.283 pelayaran. Kerugian materi mencapai USD 4.5 juta. Jumlah laporan insiden perompakan laut di Asia pada 2016 adalah yang tertinggi di dunia. Sementara itu, sebanyak 95 insiden terjadi di Afrika Barat, 27 di Afrika Timur, 27 di Amerika Latin & Karibia (OCB, 2016).

Gambar 1. Jumlah Perampokan laut di Asia Tenggara Berdasarkan Jenis Kejahatannya



Pada tahun 2016 terjadi penurunan 35% dari tahun 2015 dalam jumlah insiden yang dilaporkan di Asia. Hal tersebut merupakan sebuah pengurangan yang signifikan. Penurunan jumlah insiden pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, terutama di daerah rawan kejahatan, dikarenakan upaya patroli dan pengawasan koordinat yang terkoordinasi yang lebih efektif oleh negara-negara pesisir. Mekanisme berbagi informasi yang dipekerjakan oleh badan informasi regional dan kerjasama antara pemerintah daerah, organisasi mitra, dan komunitas pelayaran. Perampokan dan perampokan bersenjata masih menjadi bentuk kejahatan laut yang paling dominan terhadap pelayaran pedagang di Asia. Sementara itu, pencurian di kapal kargo menurun dari tahun 2015. Namun, aksi penculikan dan penyanderaan justru meningkat. Sebanyak 185 pelaut diculik, 67 pelaut serta nelayan disandera. Dua pelaut dibunuh oleh para penyandera. Salah satunya adalah Jurgen Kantner, warga negara Jerman yang video pemenggalannya beredar di dunia maya. Empat korban lainnya tewas saat insiden serangan bajak laut.

Kelompok Abu Sayyaf atau yang biasa disebut sebagai Abu Sayyaf Group (ASG) dibentuk pada tahun 1993. Abu Sayyaf dibentuk oleh Abdurajak Abubakar Janjalani, yang makin radikal setelah berpergian ke negara-negara Timur Tengah. Tahun 1988, Janjalani dilaporkan berjumpa Osama bin Laden di Pakistan dan berjuang bersama melawan invasi Soviet di Afghanistan. Setelah itu, Janjalani mulai mengembangkan misinya untuk mengubah Filipina selatan menjadi negara Islam (Deutsche Welle, 2016).

Sebelum Abu Sayyaf dibentuk secara resmi, pada sekitar tahun 1990an, Janjalani telah terlebih dahulu membentuk *Mujahideed Commando Freedom Fighters* (MCFF) untuk mengobarkan semangat jihad untuk melawan pemerintah Filipina dengan tujuan akhir membentuk sebuah Negara Islam Merdeka. MCFF ini kemudian disebut dengan Abu Sayyaf setelah banyak mendapat pengikut di daerah Basilan, Sulu, Tawi-Tawi dan Zamboanga. Selain MCFF, Jamaa Tableegh yang dibentuk di Basilan tahun 1980an oleh Abdurajak Janjalani juga dianggap sebagai perintis lahirnya kelompok Abu Sayyaf ini (Banlaoi, 2008: 13).

Sebelum peristiwa 11 September atau yang biasa dikenal dengan peristiwa 9/11, pemerintah Filipina memberikan label kelompok Abu Sayyaf murni sebagai sebuah kelompok bandit. Bahkan, Presiden Gloria Arroyo mendefinisikan Abu Sayyaf sebagai sebuah kelompok kriminal tanpa ideologi apapun. Namun setelah peristiwa 9/11, kelompok Abu Sayyaf dikenal sebagai sebuah kelompok teroris. Bahkan Amerika Serikat juga mengungkapkan bahwa Abu

Sayyaf merupakan kelompok yang termasuk ke dalam kelompok teroris internasional dan sebagai kelompok teroris utama di Asia Tenggara.

Kelompok Abu Sayyaf sendiri terjadi evolusi dari sebelumnya yang dianggap murni sebagai kelompok bandit yang melakukan tindakan kriminal terutama *kidnap-for-ransom activities* (KRAs), namun berbagai pengeboman yang dilakukannya pada tahun 2004 dan 2005 membuat Abu Sayyaf menjadi lebih dilihat sebagai sebuah kelompok terorisme daripada murni sekedar bandit. Perubahan Abu Sayyaf menjadi sebuah kelompok teroris tidak terlepas dari munculnya ideologi dalam kelompok tersebut.

Dalam keanggotaannya, sebagian besar anggota inti kelompok Abu Sayyaf berbasis di Zamboanga dan kepulauan Sulu, khususnya daerah Jolo dan Tawi-Tawi. Anggota inti Abu Sayyaf tersebut biasanya bergerak dengan cepat. Meskipun ideologi memainkan peran penting dalam konfigurasi Abu Sayyaf, terutama pasca upaya pembangkitan Abu Sayyaf sebagai kelompok teroris murni, ideologi justru bukan merupakan hal penting lagi dalam rekrutmen dan radikalisasi calon anggota kelompok Abu Sayyaf. Dukungan terhadap kelompok ini didasarkan pada hubungan kekeluargaan dan *clan* serta tradisi penentangan yang kuat terhadap kewenangan luar. Bahkan terdapat sebuah sumber mengungkapkan Abu Sayyaf juga pernah berupaya untuk melakukan perekrutan dari korban sanderanya (Fitriani, 2016).

Sejak pertama kali berdirinya kelompok Abu Sayyaf, mereka sudah banyak melakukan tindakan atau operasi-operasi yang meresahkan masyarakat. Terdapat berbagai macam operasi yang dilakukan oleh Abu Sayyaf. Berikut adalah modus operandi operasi-operasi yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf (Chalk, 2009: 45):

1. Pengeboman tingkat tinggi (*high-profile bombing*),
2. Serangan bersenjata, termasuk terhadap penduduk sipil (biasanya Barat) dan bangunan-bangunan Amerika Serikat di kota-kota besar (*urban terrorism*),
3. Pembunuhan individu-individu penting seperti misionaris Kristen, politisi Filipina, diplomat Barat dsb.,
4. Pemenggalan di depan publik,
5. Pembajakan pesawat, dan
6. Terorisme maritim, misalnya pengeboman kapal laut.

Kelompok Abu Sayyaf dibentuk pada awal tahun 1990 dan menjadi sebuah kelompok kriminal yang terlibat dalam beberapa aksi pembunuhan, penculikan untuk penyanderaan yang dimana serangan-serangan kelompok tersebut tidak hanya di Filipina akan tetapi sampai ke

Malaysia dan negara-negara sekitar. Diperkirakan bahwa pada pertengahan tahun 1990 ada kontak awal antara Abu Sayyaf dengan operasi Al-Qaeda, namun sayangnya hal tersebut belum dapat dibuktikan apakah ada kelanjutan dari hubungan tersebut atau tidak, khususnya ketika Abu Sayyaf berupaya mendanai kelompoknya sendiri melalui penculikan yang mencapai USD 20 juta (Smitt, 2002).

Terkait perkembangan jejaring terorisme, Al-Qaeda membangun jaringan teroris yang kuat di Filipina melalui kelompok Abu Sayyaf dan *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Bagi Al-Qaeda, Filipina merupakan hub utama yang direncanakan untuk misi-misi Al-Qaeda di seluruh dunia dan sebuah wilayah untuk mendanai organisasi Islam radikal. Khalifa mendirikan cabang-cabang lokal dari Saudi-based *International Islamic Relief Organization* (IIRO), yang merupakan jalur pendanaan kelompok Abu Sayyaf dan Al-Qaeda di sebuah negara.

Prinsip ‘jihad’ yang dianut oleh kelompok Abu Sayyaf merupakan implementasi dari apa yang ditanamkan oleh Al-Qaeda. Kemudian Janjalani memberi nama kelompok tersebut sebagai Abu Sayyaf. Keterkaitan antara kelompok Abu Sayyaf dengan Al-Qaeda menjadi jelas ketika hal tersebut dapat dibuktikan di tahun 1991 yang dimana kelompok Abu Sayyaf menerima 12 juta peso dari sumber-sumber asing, terutama dari Al-Qaeda, namun juga ada yang dari Libya (Gunaratna, 2001).

Kelompok Abu Sayyaf merupakan salah satu kelompok teroris yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Selain Abu Sayyaf, terdapat beberapa kelompok teroris lain seperti JI, MILF dan MNLF. Namun dalam kenyataannya, kelompok-kelompok tersebut memiliki banyak keterkaitan maupun kerjasama rahasia (termasuk dengan Al-Qaeda) untuk mencapai tujuan-tujuan general yang ingin mereka peroleh.

Selama beberapa tahun ini kelompok Abu Sayyaf telah bertanggung jawab dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan teroris serta penculikan terhadap berbagai target, termasuk pasukan keamanan Filipina, *Armed Forces of the Philippines* (AFP) dan kepentingan asing di Mindanao Barat, Kepulauan Sulu, dan Sabah. Selain itu, kelompok ini juga telah dikaitkan dengan berbagai penculikan di Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga City dan daerah lainnya di Mindanao Barat.

Warga Negara Indonesia (WNI) juga tidak lepas dari target penculikan Abu Sayyaf. Para nelayan Indonesia juga tidak lepas dari ancaman kelompok ini. Warga negara Indonesia mendapatkan perhatian publik sepanjang tahun 2016 lalu. Hal ini dikarenakan tercatat

sebanyak 7 kali anak buah kapal (ABK) asal Indonesia disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Berikut adalah peristiwa warga negara Indonesia yang disandera oleh Abu Sayyaf sepanjang tahun 2016 (Putra, 2016):

1. Kapal Tugboat Brahma 12 dan Anand 12

Kapal tugboat Brahma 12 dibajak dan disandera pada tanggal 26 Maret 2016 oleh kelompok Abu Sayyaf faksi Al Habsyi Mesaya di perairan antara Sabah dan Kepulauan Sulu sekitar pukul 15.20 waktu setempat. Kapal tersebut membawa 10 ABK asal Indonesia. Para ABK tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Jakarta. Kapal tugboat Brahma 12 menarik kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.500 Metrik Ton lebih batu bara curah milik PT Antang Gunung Meratus. Bila dinominalkan, batu bara tersebut dinilai seharga USD 300.000 dollar atau setara dengan Rp 3,9 miliar. Spesifikasi kapal Tugboat Brahma 12 sendiri memiliki panjang 24,34 meter, lebar 8 meter, dan berbobot 198 GT (*Gross Tonnage*). Adapun tongkang Anand 12 memiliki panjang 87,78 meter, lebar 27,43 meter, dan berbobot 3.913 GT (Tempo, 2016).

2. Kapal Tugboat Henry

Pada 15 April 2016, kapal tugboat Henry yang membawa 10 ABK asal Indonesia diserang oleh kelompok bersenjata. Diketahui kelompok tersebut adalah kelompok Abu Sayyaf. Kapal tugboat Henry berlayar menarik kapal tongkang Christy. Peristiwa pembajakan terhadap kapal tugboat Henry dan kapal tongkang Christy terjadi sekitar pukul 18.31 waktu setempat yang dimana kedua kapal tersebut sedang dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

3. Kapal Tugboat Charles 001 dan Kapal Tongkang Robby 152

Sebanyak tujuh orang ABK kapal tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 pada tanggal 20 Juni 2016. Kapal tugboat Charles 001 dan kapal tongkang Robby 152 adalah kapal milik PT PP Rusianto Bersaudara yang dengan misi membawa batu bara (Tempo, 2016). Kapal ini disandera oleh kelompok Abu Sayyaf saat berlayar antara Pulau Sulu dan Pulau Basilian. Sebenarnya, kapal tersebut telah melanggar larangan berlayar ke Filipina. Padahal, jalur aman untuk berlayar ke Filipina yang disarankan adalah melalui selat antara Zamboanga dan Pulau Basilian.

4. Kapal Pukat Tunda LLD113/5/F

Tiga orang anak buah kapal asal Indonesia kembali menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf. Ketiga ABK tersebut disandera pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 sekitar pukul 20.33 waktu setempat. Ketiganya disergap di kapal pukat tunda LLD113/5/F yang berbendera Malaysia oleh kelompok bersenjata di sekitar perairan Felda Sahabat, Tungku, Lahad Datu, Malaysia. Kapal tersebut adalah milik China Tong Lim. Penyandera yang menggunakan *speedboat* dan berjumlah lima lelaki kemudian membawa sandera ke wilayah perairan Filipina Selatan. . Penyandera meminta tebusan sebesar 200 juta peso atau sekitar Rp 55,5 miliar. Permintaan tersebut disampaikan oleh salah satu penyandera kepada pemilik kapal tersebut (Mimbar Rakyat, 2016).

5. Satu warga negara Indonesia disandera di Kinabatangan

Insiden penculikan kemudian kembali terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 sekitar pukul 16.00 waktu setempat, seorang anak buah kapal asal Indonesia diculik oleh kelompok Abu Sayyaf. Namun, kasus penculikan ini tidak seperti biasanya. Hal ini karena pelaku menuntut uang tebusan sebesar 10 ribu Ringgit Malaysia atau setara Rp 32 juta. Nominal uang tebusan yang diminta tersebut terbilang sangat kecil jika dibandingkan penculikan yang selama ini dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf sebelumnya (Dewi, 2016).

6. Dua warga negara Indonesia disandera di Perairan Sabah

Dua nahkoda warga negara Indonesia diculik di perairan Sabah, Malaysia. Insiden ini terjadi pada tanggal 5 November 2016. Dua warga negara Indonesia tersebut berasal dari Buton. Mereka bernama La Utu bin La Raali dan La Hadi bin La Adi yang diculik oleh kelompok Abu Sayyaf. La Utu merupakan kapten kapal ikan SSK 00520F dan La Hadi adalah kapten kapal ikan SN 1154/4F. Keduanya menahkodai kapal yang berbeda, yaitu kapal SK 00520 F dan SN 1154/4F. Mereka bekerja secara legal di kapal penangkap ikan Malaysia (Maulana, 2016).

7. Dua warga negara Indonesia disandera di Sabah

Dua nelayan warga negara Indonesia menjadi korban penculikan kelompok bersenjata saat sedang melaut di perairan Sabah, Malaysia pada tanggal 19 November 2016 pukul 19.00 waktu setempat. Pelaku penculikan tersebut adalah kelompok militan Filipina yaitu Abu Sayyaf. Saat itu, kapal nelayan yang bernomor VW 1738 tersebut sedang melaut di

antara Pulau Gaya dan Pulau Pelda, Lahad Datu, Malaysia, ketika tiba-tiba sebuah kapal cepat berisikan lima pria bersenjata mendekat (Dessthanian & Stefanie, 2016).

Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri beserta timnya mengkaji kasus-kasus penyanderaan warga negara Indonesia sejak 2004, baik yang diliput oleh media maupun tidak. Dalam kajiannya paling tidak untuk dapat membebaskan sandera oleh teroris paling cepat yaitu tiga bulan, itupun hanya dalam beberapa kasus (Hanggoro, 2016). Bahkan sebenarnya terdapat beberapa kasus penyanderaan warga negara Indonesia yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan, namun tidak terekspose oleh media.

Namun, pada tahun 2016 seluruh warga Indonesia dan bahkan masyarakat internasional memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang dimana dapat membebaskan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf tanpa membayar tebusan. Misi pembebasan sandera oleh Abu Sayyaf ini terhadap kasus penyanderaan sepuluh orang warga negara Indonesia yang merupakan anak buah kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa pembebasan warga negara Indonesia tersebut adalah hasil kerjasama yang melibatkan semua pihak yang bukan hanya antar pemerintah Indonesia dengan Filipina saja, namun juga melibatkan jaringan informal. Hal ini adalah cara dengan membuka semua opsi dengan tujuan mengupayakan keselamatan warga negara Indonesia (BBC Indonesia, 2016).

Dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia yang lainnya, pemerintah Indonesia juga melibatkan berbagai pihak baik itu formal maupun informal. Indonesia meminta bantuan kepada tokoh Filipina yaitu Nur Misuari (BBC Indonesia, 2016). Ia merupakan pimpinan *Moro National Liberation Front* (MNLF) di Filipina. Nur Misuari telah membantu Indonesia dalam misi pembebasan sandera warga negara Indonesia sejak kasus pertama di tahun 2016 yaitu sepuluh anak buah kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12. Sejak keberhasilan tersebut, pemerintah selalu meminta bantuan kapdanya untuk berperan dalam pembebasan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.

Selain Nur Misuari, negosiator Indonesia lainnya adalah Kivlan Zein dan Gubernur Sulu, Abdusakur Tan II. Kivlan Zein merupakan tokoh militer Indonesia yang pernah memegang jabatan Kepala Staf Kostrad dan yang terpenting pernah menjadi Komandan Kontingen Garuda yang memperjuangkan perdamaian di Filipina Selatan tahun 1995-1996. Melalui Nur Misuari, Kivlan Zein berhasil melakukan kontak dengan kelompok Abu Sayyaf

dan menjamin komunikasi secara intens. Bantuan terutama juga diberikan oleh Gubernur Sulu, Abdusakur Tan II. Ia merupakan keponakan pemimpin *Moro National Liberation Front* (MNLF) yaitu Nur Misuari. Hal ini dikarenakan penculiknya Al Hasbyi Misaya yang merupakan mantan supir dan pengawal saat masih menjadi Gubernur Otonomi Muslim di Mindanao atau ARMM pada tahun 1996 sampai 2001. Al Habsyi Misaya adalah seorang pemimpin senior di kelompok Abu Sayyaf yang menculik warga negara Indoensia.

Sementara itu, intel Badan Intelejen Strategis (BAIS) dan intel Filipina melakukan sebuah pendekatan terhadap kepala desa, camat, walikota dan juga gubernur Sulu untuk membujuk penculik dan menekan dengan serangan militer dan pemboman. Setelah mendapatkan bujukan dan tekanan akhirnya secara ikhlas para sandera diatur dilepas ke gubernur Sulu (Bangka Pos, 2016).

Tokoh lainnya yang turut berperan dalam pembebasan sadera adalah Ahmad Baidowi dari Yayasan Sukma. Kebebasan sandera ini tidak terlepas dari pendekatan kultural yang dilakukannya. Ahmad Baidowi diketahui sudah lama mempunyai jaringan pesantren di wilayah Mindanao sehingga mempunyai akses dengan para penyandera. Partai Nasdem juga diketahui merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam pembebasan sandera. Selain Partai Nasdem, Media Group juga terlibat dalam pembebasan sandera di bawah kendali pemerintah. Para sadera warga negara Indonesia yang telah dibebaskan oleh kelompok Abu Sayyaf diterbangkan kembali ke Indonesia menggunakan pesawat milik Surya Paloh yang dimana pemilik *Victory News*. Dengan adanya keterlibatan banyaknya aktor yang berperan dalam penyelesaian kasus ini membuat penyelesaiannya berjalan efektif karena di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri (Majalah Hubungan Internasional, 2016).

Meningkatnya globalisasi ditandai dengan semakin kompleksnya interaksi aktor-aktor internasional untuk menciptakan kerentetan timbal balik sehingga kerjasamainternasional semakin dibutuhkan untuk mengatasinya (Jmeadu, 2014: 109). Sebagai negara maritim yang luas, Indonesia sering mendapatkan gangguan keamanan di laut yang salah satunya adalah perompakan laut.

Perompakan laut atau yang juga disebut dengan bajak laut merupakan salah satu dari isu-isu keamanan non-tradisional yang memaksa pemerintah untuk menyusun strategi keamanan serta merumuskan mekanisme pemecahan masalah melalui kerjasama dengan negara sekitar. Terlebih dengan negara-negara yang juga memiliki kepentingan atas jalur pelayaran. Sebagai

isu keamanan non-tradisional, tentunya dibutuhkan kerjasama keamanan antar dua negara ataupun lebih demi menuntaskan isu tersebut.

Pada kasus perompakan laut yang dilakukan oleh Abu Sayyaf sendiri sering terjadi pada laut perbatasan seperti perairan Sulawesi-Sulu yang memiliki nilai strategis dan digunakan untuk kepentingan banyak negara. Ribuan kapal tanker minyak dan kapal dagang melintasi jalur tersebut. Karena potensi, letak, dan intensitas aktifitas laut tersebut yang ramai membuat jalur tersebut jadi sasaran oleh kelompok Abu Sayyaf untuk melakukan aksinya.

Untuk mencegah agar tidak terulang lagi kasus perompakan laut tersebut, Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia berinisiatif membangun kerjasama pengamanan laut baru. Ketiga negara ini melaksanakan pertemuan trilateral pertamanya sebulan setelah terjadi tiga kasus penyanderaan warga negara Indonesia oleh Abu Sayyaf. Pertemuan ini dinamakan sebagai *The 1st Trilateral Defence Minister* yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016.

Pada pertemuan pertama tersebut membahas isu keamanan laut di wilayah negara masing-masing. Dari pertemuan tersebut dihasilkan empat kesepakatan yang berkaitan dengan keamanan laut untuk mencegah kejahatan laut. Kesepakatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Indonesia-Malaysia-Filipina berkomitmen untuk bekerjasama dalam berpatroli menjaga perairan dari tindak kejahatan misalnya perompakan laut.
2. Pembahasan tentang reaksi ketiga negara jika tindak kejahatan seperti perompakan laut masih terjadi di wilayah perairan masing-masing.
3. Ketiga negara saling tukar-menukar informasi secara cepat dalam situasi darurat, misalnya dengan membuat *hotline* saluran informasi atau pengaduan demi meningkatkan koordinasi bantuan untuk orang atau kapal yang dalam situasi kritis serta mengintensifkan informasi dan berbagi intelijen.
4. Pembahasan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan detail pada setiap tahapan yang akan dibahas masing-masing Menteri Luar Negeri dan Panglima Militer.

Indonesia dalam upayanya meningkatkan keamanan laut mencoba untuk menerapkan *smart power*. Walaupun Indonesia terlihat lebih mengedepankan upaya diplomasi, namun sebenarnya Indonesia tetap mengupayakan untuk terus meningkatkan kekuatan militernya

demi mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat pada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia setelah pertemuan tiga negara. Penggunaan *smart power* dalam upaya meningkatkan keamanan laut yaitu melalui cara *hard power* yang dimana menggunakan kekuatan Angkatan Laut atau militer dan *soft power* yang dimana adalah salah satu cara untuk menggapai kepentingan dengan tanpa kekuatan Angkatan Laut atau militer.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan keamanan laut tersebut agar dapat memenuhi keselamatan maritim (*maritime safety*) yang menjamin keselamatan kapal, instansi, personil, dan juga warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan keselamatan (*human security*). Selain itu, dengan tercapainya keamanan laut maka dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan laut merupakan media yang paling sering digunakan dalam perdagangan internasional dan sumber daya perikanan.

Dalam ruang lingkup politik internasional, hubungan antar negara bersifat anarki. Situasi yang anarki juga mendorong aktor untuk terus mencapai kekuatan karena sistem internasional yang memandang kedaulatan sebagai sesuatu yang *absolute* yang mengarah pada terjadinya konflik adalah karena eksistensi sebuah negara adalah ancaman bagi negara lainnya (Afrimadona & Komeini, 2012: 18-19). Sehingga untuk mendapatkan sebuah keamanan (merasa aman terhadap adanya ancaman), negara perlu membangun kekuatan militernya masing-masing, baik pembangunan kekuatan militer yang bersandar pada kekuatan nasional dan aliansi sebagai bentuk dari maksimalisasi kekuatan atau implementasi strategi militer untuk mencapai makna keamanan, terutama pada keamanan maritim.

Pada upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan perompakan laut, dua bulan setelah diadakannya pertemuan pertama trilateral tersebut yaitu pada tanggal 14 Juli 2016, Indonesia, Malaysia dan Filipina menandatangani kerangka persetujuan baru untuk kerjasama yang disebut sebagai *The Sulu Sea Patrol Initiative* (SSPI) yang relevan dengan *Standart Operating Procedures* (SOP). Dari kesepakatan tersebut lahirlah sebuah inisiatif untuk melaksanakan patroli terkoordinasi yang sifatnya lebih dari sekedar patroli bersama.

Indonesia, Malaysia dan Filipina juga sepakat untuk mengizinkan personil militer untuk dapat menyebrang perbatasan jika harus mengejar para pelaku perompak laut atau teroris dengan catatan hanya dilakukan dalam keadaan darurat dan harus dilakukan dengan penyampaian informasi sebelum operasi dilakukan. Selain itu, ketiga negara juga membentuk pos komando untuk memfasilitasi koordinasi antar negara. Pos komando tersebut ditempatkan

di Bongao, Filipina; Tawau, Malaysia dan Tarakan, Indonesia. Pos-pos tersebut akan digunakan untuk menunjukkan rute laut dan pengawasan udara. Kemudian ketiga negara juga menyepakati untuk melakukan latihan Angkatan Laut bersama dan implementasi sistem identifikasi otomatis (Parameswaran, 2016).

Pada awal Agustus 2016, Menteri Pertahanan dari ketiga negara kembali melakukan pertemuan dalam *The 3rd Trilateral Defence Ministers Meeting* di Bali, Indonesia. Dalam pertemuan ini ketiga Menteri Pertahanan dari masing-masing negara membahas tentang perkembangan *Framework of Arrangement* (FoA) yang berisi tentang SOP patroli trilateral. Hal ini dilakukan untuk patroli trilateral tersebut dapat segera dilaksanakan sesegera mungkin (Divianta, 2016).

Dari pertemuan ketiga tersebut, masih dilakukan beberapa pertemuan lanjutan. Salah satu yang dihasilkan dari serangkaian pertemuan trilateral sepanjang tahun 2016 adalah terbentuknya patroli maritim trilateral Indomaphil yang diresmikan pada tanggal 19 Juni 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara. Upaya patroli maritim bersama ini didukung pula dengan diresmikannya Pusat Komando Maritim (*Maritime Command Center/ MCC*) dengan angkatan bersenjata dari Malaysia dan Filipina. MCC sendiri berada di tiga lokasi yaitu Tarakan di Indonesia, Tawau di Malaysia, dan Bangao di Filipina.

Selain itu, untuk memaksimalkan pertahanan Indonesia khususnya dalam keamanan laut maka Angkatan Laut perlu didukung dengan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang maksimal pula. Pemerintah dan Angkatan Laut melakukan beberapa upaya diantaranya *modernization, bulid up, dan naval deployment*. Dengan mempersiapkan sumber daya strategis dan penguatan Angkatan Laut merupakan bentuk upaya Indonesia agar tidak terjadinya lagi perompakan laut yang sering mengancam warga negara Indonesia khususnya para nelayan dan anak buah kapal.

Selain itu, pemerintah juga telah melakukan program *Minimum Essential Force* (MEF) atau standar minimum pengadaan yang telah dilaksanakan sejak era Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu mengemukakan bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memenuhi 50,9 persen dari program MEF tahun kedua tersebut. Pada tahun 2015 program MEF tahap kedua mencapai 33,9 persen, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 42,3 persen, dan sampai laporan pada bulan Oktober 2017 program MEF tahap kedua telah mencapai 50,9 persen. Hal ini mendakan Presiden Joko

Widodo beserta jajarannya perlu untuk memenuhi 49,1 persen dalam dua tahun hingga akhir pemerintahannya.

Selain menunjukkan upaya melalui kekuatan militer dari Angkatan Laut, negara juga mengupayakan untuk mencapai kepentingannya melalui suatu cara tanpa penggunaan kekuatan senjata atau militer. Dalam upayanya untuk meningkatkan keamanan laut, Indonesia selain mengandalkan kekuatan militernya dengan bekerja sama dengan Malaysia dan Filipina dalam patoli maritim bersama Indomaphi juga mengupayakan dari sektor diplomasi. Untuk meningkatkan keamanan dan stabilitasdi perbatasan, Indonesia terus berupaya untuk melakukan patroli secara terkoordinasi dengan Malaysia dan Filipina. Dalam hal ini, upaya diplomasi difokuskan pada menyamakan persepsi diantara ketiga negara yang komperhensif termasuk isu tentang keamanan, keselamatan navigasi serta mengamankan alur laut dan proteksi lingkungan. Dalam konteks yang lebih mengamankan alur laut tidak hanya dari perompakan laut saja, namun dari kejahatan laut yang kainnya seperti penyeludupan dan perdagangan ilegal barang, orang dan senjata serta ancaman terorisme dan perusakan lingkungan (Sinamora, 2013: 123).

Upaya lainnya untuk menghadapi perompakan laut adalah dengan mengedepankan upaya diplomasi dalam wadah organisasi ASEAN. Indoensia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN harus mampu untuk dapat menginisiasi penyelesaian dan pencegahan aktivitas kejahatan terorganisir yang terjadi di kawasan seperti yang telah dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Inisiasi tersebut dapat berupa dilpomasi preventif untuk mencegah konflik yang jauh lebih besar di perairan Filipina Selatan. Diplomasi preventif mencakup konflik antar negara atau konflik dalam suatu negara, dengan pemerintah atau kelompok-kelompok non-pemerintah sebagai aktornya, tantangan konvensional maupun non-konvensional dan suatu rangkaian instrumen diplomatik, ekonomi dan politik (Luhulima, 2011: 285).

Selain itu, diplomasi preventif juga dapat dilakukan melaui *ASEAN Regional Forum* (ARF) yang memang pada awal mulanya sudah melakukan diplomasi preventif dengan beberapa langkah seperti membangun rasa saling percaya antara negara-negara ASEAN, yang dalam hal ini terutama Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Kemudian *norm buliding* dalam membina hubungan serta meningkatkan komunikasi untuk mendorong keterbukaan dan menghindari kesalahan presepsi antar negara.

Indonesia juga melakukan diplomasi pertahanan untuk dapat meningkatkan keamanan lautnya. Strategi ini dilakukan untuk mewujudkan kepentingan nasional dan menjaga

kedaulatan Indonesia. Implementasi dari diplomasi pertahanan ini yaitu dilakukannya kerjasama *intelligence exchange group* (IEG) bersama negara-negara sekitar. Hal ini merupakan wadah untuk menumbuhkan rasa saling percaya atau *confidence building measure* (CBMs) diantara negara anggota. Dengan dilakukannya diplomasi pertahanan tersebut, maka dapat meningkatkan pula kapabilitas pertahanan (*defense capabilities*) tiap negara anggota termasuk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dapat meningkatkan citra (*prestise*) di mata dunia internasional sebagai negara yang kuat dan tangguh (Sinaga, 2017).

KESIMPULAN

Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim sejak dahulu kala. Jauh sebelum Indonesia merdeka, salah satu kerajaan Indonesia berhasil menguasai kekayaan laut Nusantara yang begitu melimpah. Negara maritim sendiri secara terbuka dicetuskan oleh Indonesia dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957. Laut sendiri memiliki arti penting bagi Indonesia yaitu sebagai *network* dari aktivitas perdagangan, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali untuk dapat mengamankan laut Indonesia dari berbagai kejahatan di laut.

Pada tahun 2016, Indonesia harus berhadapan dengan kasus penculikan warga negara Indonesia secara berturut-turut. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan bagi warga Indonesia itu sendiri. Pelaku dari penculikan tersebut dikenal dengan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini lahir sebagai organisasi yang menggunakan metode terorisme. Seperti halnya kelompok terorisme yang lain, mereka perlu sumber dana untuk dapat melakukan aksi-aksinya. Salah satu cara mereka untuk mendapatkan sumber dana yaitu dengan menculik dan meminta tebusan.

Akan tetapi, Indonesia berhasil membebaskan para sandera warga negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf tanpa membayar uang tebusan. Hal tersebut sangat diapresiasi oleh dunia internasional. Indonesia tidak sendiri dalam membebaskan para sandera, yang terlibat dalam misi pembebasan tersebut tidak hanya antar negara dengan negara tetapi juga melibatkan beberapa aktor non-negara. Semua yang terlibat dalam misi tersebut dikoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri dan mengutamakan keselamatan para sandera yaitu warga negara Indonesia.

Kemudian tantangan selanjutnya yaitu bagaimana agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Oleh karena itu, Indonesia sadar perlu adanya upaya untuk meningkatkan keamanan laut yang lebih baik. Sebagai isu non-tradisional maka dibutuhkan kerjasama keamanan antar dua negara ataupun lebih. Kemudian Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia mengadakan beberapa kali pertemuan untuk dapat menyelesaikan masalah perompakan laut

tersebut. Ini merupakan reaksi awal dari kasus penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Hasil dari pertemuan ketiga negara tersebut yaitu bekerjasama dalam patroli menjaga perairan dari tindak kejahatan, reaksi ketiga negara mengenai tindak kejahatan di laut, saling tukar-menukar informasi dan berbagi intelijen dan pembahasan standar operasional prosedur (SOP).

Kebijakan Indonesia sendiri dalam meningkatkan keamanan lautnya sendiri dengan mengimplementasikan konsep *smart power*. Konsep tersebut adalah upaya untuk menggapai kepentingan nasional dengan menggabungkan cara *hard power* dan *soft power*. Cara tersebut dipercaya lebih efektif ketimbang hanya mengandalkan salah satu dari *power* tersebut. Dari sektor *hard power*, TNI Angkatan Laut lah aktor utama dalam garda depan untuk mengamankan perairan Indonesia dari kejahatan laut. Dalam upayanya untuk mencegah penculikan warga negara Indonesia terulang kembali, Angkatan Laut bersama dengan angkatan bersenjata Malaysia dan Filipina bekerjasama dengan mengadakan patroli bersama yang dinamakan sebagai Patroli Maritim Indomaphil. Selain itu, patroli bersama Indomaphil tersebut didukung dengan diresmikannya *Maritime Command Center* (MCC) untuk dapat memaksimalkan kegiatan patroli bersama tersebut. Disamping itu, Angkatan Laut juga terus memaksimalkan kekuatan yang ada dengan pengadaan alutsista. Pemerintah dan Angkatan Laut melakukan beberapa upaya yang diantaranya adalah *modernization*, *build up*, dan *deployment*.

Kemudian dari sektor *soft power* yaitu dengan mengandalkan diplomasi yang menutut Kementerian Luar Negeri sebagai *leading sector* dalam mengkoordinasi pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan patroli bersama Indomaphil, diplomasi ini digunakan untuk dapat menyamakan persepsi dari ketiga negara untuk isu keamanan, keselamatan navigasi dan mengamankan alur laut serta proteksi lingkungan. Selain itu, upaya yang dilakukan Indonesia dalam mencegah kejahatan di laut terutama pada perompakan laut oleh Abu Sayyaf adalah dengan menggunakan wadah organisasi ASEAN untuk menginisiasi penyelesaian dan pencegahan aktivitas kejahatan terorganisir yang terjadi di kawasan. Kemudian Indonesia juga melakukan kerjasama *intelligence exchange group* (IEG) bersama negara-negara sekitar. Hal ini merupakan wadah untuk menumbuhkan rasa saling percaya diantara negara anggota dan meningkatkan kapabilitas pertahanan serta dapat meningkatkan citra di mata dunia internasional. Dengan mengkombinasikan upaya dari kedua sektor tersebut, maka akan lebih efisien untuk dapat menggapai kepentingan nasional yaitu meningkatkan keamanan laut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. hlm 266
- C. Banlaoi, Rommel. 2008. *Al Harakatul Al Islamiyyah; Essays on the Abu Sayyaf Group*. Philippine Institute for Political Violence and Terrorism Research (PIPVTR). hlm 13
- Chalk, Peter, et al. 2009. *The Evolving Terrorist Threat to Southeast Asia*. Published by Rand Corporation. hlm 45
- Jemadu, Aleksius. 2014. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 109
- Afrimadona. Komeini, Yugolastarob. 2012. *Perspektif-perspektif Utama Dalam Kajian Strategis*. Jakarta: FISIP UPN Press. Hlm. 18-19
- Simamora, Parulian. 2013. *Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 123
- Luhulima, C.P.F. 2011. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 285

JURAL DAN DOKUMEN:

- Doktrin TNI AL Eka Sasana Jaya. (Jakarta:MABESAL) hlm 10
- Departemen Kelautan dan Perikanan Sekretaris Jenderal Satuan Kerja Dewan Maritim Indonesia. 2008. "Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Konevensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) di Indonesia". DKP: Jakarta. hlm. 2
- Dinas Penerangan TNI AL. 2002. "Keamanan Laut Tanggungjawab Siapa?". diakses dari <http://www.tni.mil.id/view-31-font+colorbluekeamanan+laut+ta nggungjawab+siapa+font.html> pada tanggal 28 November 2017 pukul 12.42 WIB
- Martiana Wulansari, Eka. 2014. "Penegakan Hukum di Laut dengan Sistem *Single Agency Multy Tasks*".
- Usadi, Bambang. 2014. "Sistem Penegakan Hukum dalam RUU Kelautan". Jurnal Maritim (jurnalmaritim.com)
- OCB. 2016. Piracy and Robbery Against Ships in Asia Report 2016
- Majalah Hubungan Internasional. 2016. "Keberhasilan Diplomasi Total". Vol.VIII, No. 10/II/P3DI/Mei/2016. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Sinaga, Thomas H.K.. 2017. "Diplomasi Pertahanan Indonesia Melalui Kerjasama Intelligence Exchange Group (IEG) di Selat Malaka"

ARTIKEL DAN BERITA:

- Ziyadi, A.. 2016. "Daftar Alutsista TNI Hasil MEF Dari Era Presiden SBY". diakses dari <http://militermeter.com/daftar-alutsista-tni-hasil-mef-dari-era-presiden-sby/> pada tanggal 22 Oktober 2017 pukul 17.24 WIB
- Sangkoeno. 2015. "Diplomasi Maritim". diakses dari <http://www.sangkoeno.com/2015/01/diplomasi-maritim.html> pada tanggal 23 Oktober 2017 pukul 08.24 WIB

- Sunardi, Lili. 2015. “Diplomasi Maritim: RI Ratifikasi Seluruh Perjanjian”, diakses dari <http://industri.bisnis.com/read/20150202/98/397700/diplomasi-maritim-ri-ratifikasi-seluruh-perjanjian> pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 16.34 WIB
- TNI AL. 2017. diakses dari <http://www.tnial.mil.id/Aboutus/TugasTNIAL.aspx> pada tanggal 29 November 2017 pukul 09.23 WIB
- Buana, Dedek. 2017. “Tugas dan Wewenang POLRI (UU No. 2 Tahun 2002)”. diakses dari <http://artikelddk.com/tugas-dan-wewenang-polri-uu-no-2-tahun-2002/> pada tanggal 2 Desember 2017 pukul 17.34 WIB
- POLAIR. 2017. diakses dari <http://polair.polri.go.id/profil-polair/tugas-pokok-visi-dan-misi/#1447911036396-a431d0f8-1a78> pada tanggal 29 November 2017 pukul 09.45 WIB
- Sihite, Ezra. 2014. “Presiden Ubah Bakorkamla Jadi Bakamla”. diakses dari <http://www.beritasatu.com/nasional/233423-presiden-ubah-bakorkamla-jadi-bakamla.html> pada tanggal 9 Desember 2017 pukul 10.24 WIB
- Al-Birra, Fadhil. 2017. “Penyelundupan Barang Ilegal Masih Marak, 400 kasus Selama 2017”. diakses dari <https://www.jawapos.com/read/2017/11/20/169596/penyelundupan-barang-ilegal-masih-marak-400-kasus-selama-2017> pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 17.34 WIB
- Bina Desa. 2016. “Perompakan Merajalela Nelayan Menderita Kerugian Miliaran Rupiah”. diakses dari <http://binadesa.org/perompakan-merajalela-nelayan-menderita-kerugian-miliaran-rupiah/> pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 20.04 WIB
- UNCLOS. “Part VII: High Seas”. diakses dari http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/part7.htm pada tanggal 12 Januari 2018 pukul 14.56 WIB
- Deutsche Welle. 2016. “Inilah Profil Abu Sayyaf”. diakses dari <http://www.dw.com/id/inilah-profil-abu-sayyaf/g-19190224> pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 12.43 WIB
- Global Security. 2010. “Abu Sayyaf Group (ASG) Al Harakut Al Islamiyya Al-Harakatul Islamia "Bearer of the Sword" "Sword of God"”. diakses dari <http://www.globalsecurity.org/military/world/para/abusayyaf.htm> pada tanggal 15 Januari 2018 pukul 13.10 WIB
- Fitriani, Syarifah. 2016. “Kelompok Abu Sayyaf pernah coba rekrut sandera Indonesia”. diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/131942-kelompok-abu-sayyaf-coba-rekrut-sandera-indonesia> pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 14.20 WIB
- Smitt, Eric. 2002. “U.S. and Philippine Setting up Joint Command to Combat Terror” New York Times, January 16. diakses dari <http://www.nytimes.com/2002/01/16/world/nation-challenged-pacific-error-us-philippines-setting-up-joint-operations.html> pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 14.29 WIB
- Gunaratna, Rohan. 2001. “The Evolution and Tactics of the Abu Sayyaf Group,” Jane’s Intelligence Review. diakses dari <https://www.rsis.edu.sg/staff-publication/1293-the-evolution-and-tactics-of/#.Wng0OncxXIV> pada tanggal 25 Januari 2018 pukul 14.32 WIB

- Putra, Lutfy Mairizal. 2016. "Ini 7 Peristiwa Penyanderaan WNI Sepanjang Tahun Ini". diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2016/12/20/07535671/ini.7.peristiwa.penyanderaan.wni.sepanjang.tahun.ini?page=all> pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 10.23 WIB
- Tempo. 2016. "Diduga Disandera Abu Sayyaf, Ini Nama Awak Kapal Brahma 12". diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/757804/diduga-disandera-abu-sayyaf-ini-nama-awak-kapal-brahma-12> pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 12.30 WIB
- Tempo. 2016. "Ini Kronologi Penculikan Kapal Charles dan Kapal Robby". diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/782874/ini-kronologi-penculikan-kapal-charles-dan-kapal-roby> pada tanggal 31 Januari 2018 pukul 16.14 WIB
- Mimbar Rakyat. 2016. "Tiga ABK Indonesia Kembali Disandera". diakses dari <http://www.mimbar-rakyat.com/detail/tiga-abk-indonesia-kembali-disandera/> pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 09.14 WIB
- Dewi, Santi. 2016. "Lagi, ABK Indonesia diculik kelompok bersenjata di perairan Malaysia". diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/142216-abk-kembali-jadi-korban-penculikan-malaysia> pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 10.02 WIB
- Maulana, Victor. 2016. "Kemlu RI Benarkan Penculikan 2 WNI di Perairan Sabah". diakses dari <https://international.sindonews.com/read/1153158/40/kemlu-ri-benarkan-penculikan-2-wni-di-perairan-sabah-1478420054> pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 12.42 WIB
- Dessthanian, Riva. Stefanie, Christie. 2016. "Kronologi Penculikan Dua WNI di Perairan Sabah". diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20161121120459-106-174091/kronologi-penculikan-dua-wni-di-perairan-sabah> pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 14.21 WIB
- Hanggoro, Marcheilla Ariesta Putri. 2016. "Kemlu: Proses pembebasan sandera Abu Sayyaf bisa berbulan-bulan". diakses dari <https://www.merdeka.com/dunia/kemlu-proses-pembebasan-sandera-abu-sayyaf-bisa-berbulan-bulan.html> pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 09.36 WIB
- BBC Indonesia. 2016. "Presiden: Pembebasan 10 WNI dari Abu Sayyaf hasil kerja sama banyak pihak". diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160501_indonesia_wni_sandera_besba pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 10.34 WIB
- BBC Indonesia. 2016. "Siapa Nur Misuari, 'tokoh' di balik pembebasan sandera Abu Sayyaf". diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/10/161003_dunia_penjelasan_nur_misuari pada tanggal 5 Februari 2018 pukul 12.42 WIB
- Banka Pos. 2016. "Inilah Sosok Negosiator Pembebasan Sandera Abu Sayyaf, Ternyata Ia Tim Sukses". diakses dari <http://bangka.tribunnews.com/2016/05/02/inilah-sosok-negosiator-pembebasan-sandera-abu-sayyaf-ternyata-ia-tim-sukses> pada tanggal 7 Februari 2018 pukul 16.34 WIB
- Parameswaran, Prashanth. 2016. "New Sulu Sea Trilateral Patrols Officially Launched in Indonesia". diakses dari <http://thediplomat.com/2016/08/new-sulu-sea-trilateral-patrols-officially-launched/> pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 14.21 WIB
- Divianta, Dewi. 2016. "Pertemuan 3 'Negara' di Bali Membahas Keamanan Laut Sulu". diakses dari <http://global.liputan6.com/read/2567141/pertemuan-3-negara-di-bali-membahas-keamanan-laut-sulu> pada tanggal 21 Februari 2018 pukul 15.41 WIB